

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perkotaan memiliki peran sebagai pusat kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Peran besar yang dimiliki kota tersebut dibutuhkan suatu perencanaan wilayah perkotaan yang matang dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sebuah kota. Secara umum masalah kependudukan di perkotaan meliputi: jumlah penduduk yang besar atau padat, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata dan masalah mobilitas penduduk.

Keadaan tersebut tidak terlepas dari jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada data statistik tahun 2019 penduduk berjumlah 265.015.300 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,33 % (Badan Pusat Statistik, 2019). Dari adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengharuskan adanya penambahan fasilitas sosial. Jumlah penduduk yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan sosial menjadi landasan atas kepuasan penggunaan pelayanan fasilitas sosial tersebut, makin tinggi tingkat pemanfaatan layanan berarti terdapat kecenderungan untuk menambah fasilitas pelayanan sosial (Sudyohutomo, 2008).

Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa, karena jumlah penduduk yang besar memerlukan berbagai fasilitas pelayanan baik sosial dan ekonomi, untuk pengembangan

potensi yang ada pada diri seseorang. Namun pembangunan fasilitas pelayanan itu belum merata di berbagai bidang termasuk dalam bidang fasilitas pelayanan sosial. Permasalahan itu timbul disebabkan oleh (a) kurang tersedianya fasilitas pelayanan sosial untuk kebutuhan masyarakat, (b) pola perencanaan pembangunan yang tidak dirancang dengan tepat tujuannya (c) kurang kesiapan masyarakat atau sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam, yang memerlukan pengelolaan lebih intensif agar mampu memiliki produktifitas yang tinggi (Tarigan 2006).

Umumnya Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk yang besar. Dan jumlah penduduk tersebut harus diimbangi dengan penyediaan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Fasilitas pelayanan sosial yang dimaksud adalah ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, olahraga dan fasilitas pelayanan keagamaan. Demikian juga ketersediaan fasilitas ekonomi mencakup fasilitas pelayanan pasar, toko, kios atau warung, pusat niaga, pasar, bank, *shopping center* (Muta'ali 2013).

Selanjutnya Muta'ali (2013) juga menjelaskan bahwa, ketersediaan fasilitas pelayanan itu berbeda menurut fasilitasnya dan ini tergantung pada indikator atau standar pengukurannya baik dalam fasilitas pelayanan sosial maupun fasilitas pelayanan ekonomi. Ketersediaan fasilitas ini berbeda pula di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara diantaranya di Kota Binjai. Pelayanan sosial umumnya digunakan untuk menunjukkan berbagai pelayanan yang sebagian atau secara keseluruhan diberikan oleh negara dengan tujuan utama memperbaiki kualitas hidup manusia dari pada menyokong kegiatan produksi atau memberikan keuntungan finansial secara langsung pelayanan yang sering

dimasukkan dalam kategori ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

Binjai adalah salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90, 23 km² dengan 5 wilayah kecamatan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kota Binjai semakin bertambah. Hal ini terlihat pada jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 261.490 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 264.687 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 267. 901 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 270.926 jiwa, serta pada tahun 2018 sebanyak 273.892 jiwa (BPS Binjai Dalam Angka 2014-2018). Pertambahan penduduk Kota Binjai ini mengakibatkan terjadinya perubahan tata ruang wilayah terutama dalam bidang fasilitas sosial, seluruh penduduk tersebut tentu membutuhkan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beberapa fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpenting antara lain pendidikan dan kesehatan. Menurut data statistik, untuk jumlah usia sekolah pada tahun 2018 di Kota Binjai, SD dari umur 7-12 tahun berjumlah 29.144 terdiri dari 163 sekolah, SMP dari umur 13-15 tahun berjumlah 14.516 terdiri dari 50 sekolah, dan untuk SMA dari umur 16-18 tahun berjumlah 14.352 terdiri dari 51 sekolah. Dan jika melihat pada jumlah siswa yang bersekolah di Kota Binjai memiliki perbedaan dengan jumlah usia sekolah yang ada, untuk jumlah siswa yang bersekolah SMP sebanyak 12.304 dengan jumlah usia sekolah sebanyak 14.516, kemudian untuk SMA sebanyak 19.479 dengan jumlah usia sekolah 14.352. Dalam bidang fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di kota Binjai balai pengobatan berjumlah 6 unit, puskesmas pembantu terdiri dari 18

unit, rumah sakit terdiri dari 9 unit dan puskesmas terdiri dari 8 unit. Terjadi penurunan dalam tenaga kesehatan, dimana dokter spesialis di tahun 2017 berjumlah 156 dokter, namun di tahun 2018 berjumlah 96 dokter (BPS Binjai Dalam Angka 2019).

Dengan permasalahan pelayanan sosial yang telah dijelaskan di atas, Maka perlu dikaji kesesuaian jumlah fasilitas dengan jumlah penduduk serta bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia. Akan tetapi dengan adanya aksesibilitas yang sudah cukup memadai di Kota Binjai maka sangat memungkinkan penduduk yang ada di wilayah tersebut memilih untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sosialnya diluar dari Kota Binjai. Dari latar belakang masalah tersebut maka perlu dikaji ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dengan jumlah penduduk di Kota Binjai.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah maka yang menjadi acuan identifikasi masalah adalah, ketersediaan fasilitas pelayanan sosial mencakup, fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA), fasilitas kesehatan (Balai pengobatan, Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit) dan kelengkapan sarana dan prasarana.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka Masalah penelitian dibatasi hanya pada ketersediaan layanan sosial pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pelayanan pendidikan (SD, SMP, SMA) kesehatan (Balai pengobatan, Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit Dokter, Perawat, Bidan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA) di Kota Binjai ?
2. Bagaimana kesesuaian jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas kesehatan (Balai pengobatan, Pustu, Puskesmas, Rumah Saki Dokter, Bidan, Perawat) di Kota Binjai ?
3. Kelengkapan fasilitas pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan yang tersedia di Kota Binjai ditinjau dari kelengkapan sarana dan prasarana ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas sosial pendidikan (SD, SMP, SMA) di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui kesesuaian jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas sosial kesehatan (Balai pengobatan, Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter, Bidan, Perawat) di Kota Binjai.
3. Untuk kelengkapan fasilitas pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan yang tersedia di Kota Binjai ditinjau dari kelengkapan sarana dan prasarana.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan berfikir penulis terkait pertumbuhan penduduk dan ketersediaan fasilitas sosial di Kota Binjai.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan ketersediaan fasilitas sosial, bagi pemerintah Kota Binjai.
3. Sebagai tambahan ilmu Geografi dan juga sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan pendidikan pada umumnya dan UNIMED pada khususnya.

THE
Character Building
UNIVERSITY